

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., 2015. *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang*, Serang: s.n.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2019. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Erlangga.Jakarta.
- Carter, William K. 2009. *Akuntansi Biaya*. Edisi 14. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat. 2011. *Definisi Efektivitas*, Bandung: Angkasa.
- Jogiyanto, H. M. 2005. *Analisa Dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- KAUR, B. K. D. K. (2008). *Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR*. In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 3, 1–11.
- Krismiaji, (2020). *Sitem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi pelayanan publik. pembaruan*. Yogyakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . 2021, *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang*,halaman 26
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lubis & Husain, 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: DPP AMP YKPN
- Mardiasmo, Prof, Mba, Ak. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In Penerbit ANDI.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat

- Perubahan renstra. 2018-2022, *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang*, halaman 54-66
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi, 2(1), 37-46.
- Rudianto 2009, *Penganggaran*, Erlangga, Jakarta.
- Said, A. L. (2015). *CSR dalam Prospektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Septiputri. 2013. *Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011*, Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Syafiie, Inu Kencana. (2007), *Menejemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2015. *Manajemen Publik*. Grasindo. Jakarta
- Tangkilisan, S. 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widayarsana.
- Yulastina, A.2018. *Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Akuntansi,2(1):10-11
- Yulastina, A.2018. *Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Akuntansi,2(1):10-11
- Yuwono, Sonny dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Zarinah Monik, Dr. Darwanis, dan Dr. Abdullah, S. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas SDM terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kab Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. pp.90-97.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- Pasal 4 ayat 1 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi

pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan lampiran.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.